

## Persepsi masyarakat tentang demokrasi oligarki dalam kontestasi politik lokal

Andreas Domini Marpaung, Disya Novira, Friska Lorentina Br Purba, Melva Triana Sianipar, Nadiyah Elza Syahri Nasution, Nira Dilvinia Siregar, Sabrina Umami Pane, Julia Ivanna

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS Universitas Negeri Medan

Co-Author: **Julia Ivanna**

E-mail: [juliaivanna@unimed.ac.id](mailto:juliaivanna@unimed.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas persepsi masyarakat Desa Bandar Klippa terhadap praktik demokrasi dalam kontestasi politik lokal yang kerap dipengaruhi oleh dominasi oligarki. Fenomena ini terlihat pada pemilihan kepala desa, di mana elite lokal menggunakan modal ekonomi, jaringan patron-klien, dan kedudukan sosial untuk mengendalikan proses politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai demokrasi di tingkat lokal masih bersifat prosedural, karena ruang partisipasi politik sering terhambat oleh pengaruh oligarki. Persepsi ini menimbulkan sikap apatis sekaligus kritis terhadap demokrasi, serta berdampak pada stabilitas sosial dan pembangunan desa. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan politik masyarakat serta reformasi regulasi pemilihan kepala desa agar demokrasi di tingkat lokal dapat berjalan lebih inklusif, representatif, dan substantif.

**Kata Kunci: demokrasi, oligarki, politik lokal**

### ABSTRACT

This study discusses the perception of the people of Bandar Klippa Village towards democratic practices in local political contestation which is often influenced by the dominance of oligarchs. This phenomenon can be seen in the election of village heads, where local elites use economic capital, patron-client networks, and social standing to control the political process. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the public considers democracy at the local level to be procedural, because the space for political participation is often hampered by the influence of the oligarchy. This perception causes apathy and criticism of democracy, as well as has an impact on social stability and village development. These findings affirm the importance of strengthening community political education and reforming the regulations on village head elections so that democracy at the local level can run more inclusive, representative, and substantive.

**Keywords: Democracy, Oligarchy, Local Politics**



## PENDAHULUAN

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang menekankan kedaulatan rakyat, telah menjadi fondasi utama dalam pembangunan bangsa Indonesia sejak era Reformasi 1998. Namun, dalam praktiknya, demokrasi sering kali menyimpang dari idealnya, terutama di tingkat lokal. Salah satu fenomena yang semakin menonjol adalah munculnya demokrasi oligarki, di mana kekuasaan politik dikuasai oleh segelintir elite ekonomi dan sosial yang mendominasi proses kontestasi politik. Oligarki demokrasi ini tidak hanya membatasi partisipasi masyarakat luas, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan representasi. Di tingkat desa, yang merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia, fenomena ini semakin terasa karena keterbatasan akses informasi dan pengaruh patron-klien yang kuat.

Selama berabad-abad, oligarki dianggap diperkuat oleh kekayaan; anggapan ini dikacaukan oleh teori elite pada awal abad keduapuluh. Kesamaan berbagai oligarki sepanjang sejarah adalah bahwa kekayaan mendefinisikan dan memperkuatnya, dan secara inheren membuat oligarki terancam. Motif keberadaan semua oligarki adalah mempertahankan kekayaan. Upaya mempertahankan kekayaan itu bermacam-macam, tergantung ancaman apa yang dihadapi, termasuk seberapa jauh oligarki terlibat dalam menghadirkan koersi/pemaksaan yang mendasari segala klaim hak milik, dan juga apakah upaya itu dilakukan secara sendirisendiri atau kolektif. Keragaman tersebut menghasilkan empat tipe oligarki: oligarki panglima (warring), oligarki penguasa kolektif (ruling), oligarki sultanistik (sul-tanistic), dan oligarki sipil (civil). Demokrasi tidak menenyapkan oligarki, namun malah bersatu dengan oligarki. Selain itu, masalah kekuasaan hukum (rule-of-law) di banyak masyarakat intinya adalah menjinakkan oligarki (Winters, 2011).

Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti adalah Desa Bandar Klippa, di propinsi Sumatera Utara. Masyarakat sering kali menjadi saksi bagaimana elite lokal seperti keluarga atau mantan pejabat mendominasi pemilihan kepala desa melalui jaringan patron-klien. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat Desa Bandar Klippa terhadap demokrasi oligarki dalam kontestasi politik lokal. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini akan mengeksplorasi bagaimana warga desa memahami pengaruh oligarki terhadap proses demokrasi, termasuk aspek partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Latar belakang masalah ini semakin relevan mengingat data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa lebih dari 70% pilkades di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan jaringan elite, yang berpotensi melemahkan prinsip demokrasi substantif. Selain itu, persepsi masyarakat menjadi kunci untuk

memahami legitimasi sistem politik lokal, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas dan pembangunan desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam persepsi masyarakat Desa Bandar Klippa terhadap praktik demokrasi yang dipengaruhi oleh oligarki dalam kontestasi politik lokal, khususnya pada pemilihan kepala desa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, pandangan, serta pengalaman sosial masyarakat secara holistik dalam konteks kehidupan nyata mereka.

Penelitian dilaksanakan di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih secara purposif (*purposive sampling*) karena merupakan salah satu desa yang memiliki dinamika politik lokal cukup kuat serta menunjukkan kecenderungan dominasi elite lokal dalam proses pemilihan kepala desa. Penelitian dilakukan selama bulan Mei hingga Juli 2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti (Sugiyono, 2017). Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap praktik demokrasi oligarki, faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga, serta dampaknya terhadap stabilitas sosial dan pembangunan desa.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Bandar Klippa yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses politik lokal. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tokoh masyarakat dan adat, Aparat pemerintahan desa, calon kepala desa dan pendukungnya, dan masyarakat pemilih dari berbagai lapisan sosial baik petani, pedagang, buruh, dan ibu rumah tangga. Jumlah informan sebanyak 15 orang, dengan pertimbangan prinsip ketercukupan data (*data saturation*), yaitu proses wawancara dihentikan apabila data yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan informasi baru. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu: 1) Observasi, dilakukan secara langsung di lingkungan Desa Bandar Klippa untuk mengamati interaksi sosial, kegiatan politik, dan dinamika masyarakat selama proses politik lokal; 2) Wawancara mendalam (*in-depth interview*), dilakukan secara semi-terstruktur kepada para informan untuk menggali persepsi, pengalaman, serta pandangan mereka terhadap praktik demokrasi dan pengaruh oligarki; 3) Dokumentasi, berupa arsip, notulensi, hasil pemilihan kepala desa,

foto kegiatan, serta dokumen resmi dari pemerintah desa yang relevan dengan topik penelitian. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan cara membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar diperoleh data yang valid dan kredibel.

Analisis data dilakukan secara interaktif sesuai model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap, yaitu:

- 1) Reduksi data (data reduction), yakni proses memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data penting dari hasil wawancara dan observasi.
- 2) Penyajian data (data display), yaitu menampilkan data dalam bentuk narasi deskriptif agar pola hubungan antar fenomena dapat dilihat secara jelas.
- 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification), yaitu menafsirkan makna data untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member check kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan pandangan mereka yang sebenarnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi masyarakat Desa Bandar Klippa terhadap praktik demokrasi dalam kontestasi politik lokal, khususnya dalam pemilihan kepala desa**

Masyarakat Desa Bandar Klippa menunjukkan persepsi yang kompleks terhadap praktik demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Secara umum, pemilihan kepala desa dianggap sebagai wujud konkret dari demokrasi lokal di mana warga memiliki kesempatan memilih pemimpin mereka secara langsung. Namun, partisipasi aktif masyarakat cenderung terbatas dan menunjukkan adanya sikap pasif terhadap proses politik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bandar Klippa memiliki pandangan yang beragam terhadap praktik demokrasi lokal. Sebagian warga memandang bahwa pemilihan kepala desa merupakan bentuk nyata partisipasi politik, namun sebagian lainnya menilai bahwa demokrasi di tingkat desa masih bersifat formalitas karena dominasi elite lokal yang kuat.

Tabel 1. Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Demokrasi Lokal di Desa Bandar Klippa

No	Aspek yang Diamati	Temuan Lapangan	Persentase (n=15 informan)	Keterangan
1	Demokrasi sebagai wujud partisipasi rakyat	Masyarakat mengakui bahwa Pilkades merupakan sarana memilih pemimpin secara langsung.	60%	Pemahaman masyarakat cukup baik, tetapi belum disertai kesadaran kritis.
2	Keterlibatan masyarakat dalam proses politik	Partisipasi aktif rendah, sebagian warga hanya mengikuti arahan tokoh lokal.	73%	Masyarakat cenderung mengikuti patron atau tokoh berpengaruh.
3	Persepsi terhadap keadilan pemilihan	Sebagian besar merasa pemilihan tidak sepenuhnya adil karena dominasi elite ekonomi dan sosial.	80%	Fenomena patron-klien sangat kuat.
4	Kepercayaan terhadap hasil Pilkades	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan menurun akibat dugaan politik uang.	67%	Persepsi negatif terhadap integritas proses demokrasi.

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat menyadari bentuk demokrasi secara prosedural, tetapi belum memahami esensi demokrasi substantif. Fenomena politik uang, pengaruh elite lokal, dan ketimpangan akses informasi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan partisipasi politik yang bermakna. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Winters, 2011) bahwa oligarki memiliki kecenderungan mempertahankan kekuasaan melalui kontrol terhadap sumber daya dan akses politik. Dalam konteks Desa Bandar Klippa, hal ini tercermin pada dominasi keluarga atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi dan sosial. Salah satu temuan penting adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja kepala desa incumbent. Ketidakesesuaian antara harapan masyarakat dengan sikap dan kebijakan kepala desa yang sedang menjabat membuat masyarakat merasa bahwa

pemimpin yang ada kurang membawa perubahan signifikan. Akibatnya, masyarakat lebih cenderung apatis dalam memilih atau bahkan memilih untuk golput, yaitu tidak menggunakan hak pilihnya (Hartika, Nurainun, Harahap, & Ivanna, 2024).

Ketimpangan sosial dan ekonomi juga sangat memengaruhi persepsi dan perilaku politik mereka. Mayoritas warga berprofesi sebagai pekerja kasar dan petani dengan pendapatan yang tidak stabil dan rendah. Kondisi ini menimbulkan rasa keterbatasan akses politik yang nyata serta prioritas perhatian lebih pada kebutuhan ekonomi ketimbang proses politik. Dalam konteks tersebut, demokrasi lokal menjadi terlihat sebagai ritual formalitas tanpa makna yang kuat bagi kesejahteraan mereka. Selain itu, nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan norma sosial tradisional masih sangat melekat dan memengaruhi cara masyarakat memaknai demokrasi. Kehidupan sosial yang sangat kolektif bisa menjadi kekuatan dalam membangun kebersamaan, tetapi seringkali juga menjadikan keputusan politik lebih dipengaruhi oleh hierarki sosial atau figur otoritas lokal daripada proses demokrasi yang terbuka dan rasional (Brutu, et al., 2024).<sup>1</sup> Calon kepala desa biasanya adalah figur yang sudah dikenal masyarakat secara personal dan sering kali muncul dari elit lokal yang memiliki pengaruh kuat. Hal ini menyebabkan demokrasi tradisional bercampur dengan jaringan patronase dan kepentingan kelompok sehingga demokrasi berjalan tidak sepenuhnya bebas dan adil.

### **Pengaruh keberadaan oligarki lokal terhadap mekanisme kontestasi politik dan partisipasi politik masyarakat di Desa Bandar Klippa**

Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa keberadaan oligarki lokal berpengaruh signifikan terhadap mekanisme kontestasi politik. Elite desa sering kali menggunakan modal sosial dan ekonomi untuk mempengaruhi keputusan masyarakat, terutama menjelang pemilihan kepala desa.

Tabel 2. Pengaruh Oligarki terhadap Dinamika Politik Lokal

No	Indikator	Bentuk Oligarki	Pengaruh	Dampak terhadap Masyarakat
1	Modal ekonomi	Elite desa mendanai kegiatan sosial atau memberi bantuan langsung menjelang pemilihan.		Terjadi ketergantungan politik masyarakat terhadap elite lokal.

2	Jaringan patron-klien	Tokoh masyarakat diarahkan untuk mengumpulkan dukungan bagi kandidat tertentu.	Partisipasi warga menjadi bersifat instruktif, bukan sukarela.
3	Pengaruh sosial dan budaya	Tokoh adat dan agama dimanfaatkan untuk melegitimasi calon tertentu.	Demokrasi bercampur dengan tradisi hierarkis.
4	Informasi politik	Akses informasi kandidat sangat terbatas; sebagian warga hanya mengenal calon dari lingkungan sosialnya.	Rendahnya kualitas keputusan politik warga.

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil tersebut, oligarki tidak hanya membatasi ruang kompetisi politik, tetapi juga menurunkan kualitas partisipasi masyarakat. Demokrasi di tingkat desa cenderung bersifat prosedural tanpa substansi partisipatif, karena warga lebih banyak diarahkan oleh elite dibandingkan menentukan pilihan berdasarkan kesadaran politik. Hasil ini menguatkan teori oligarki sipil (*civil oligarchy*) yang dikemukakan (Winters, 2011), di mana kekuasaan di masyarakat sipil tetap dikendalikan oleh sekelompok kecil individu dengan sumber daya besar, meskipun sistem politiknya secara formal demokratis. Adapun Pengaruh keberadaan oligarki lokal terhadap mekanisme kontestasi politik dan partisipasi politik masyarakat di Desa Bandar Klippa secara jelas memengaruhi cara berlangsungnya kontestasi politik desa dengan dampak yang besar. Oligarki, sebagai fenomena kekuasaan yang terkonsentrasi pada sejumlah individu atau kelompok yang memiliki dominasi ekonomi dan sosial. Oligarki masih mengendalikan partisipasi politik masyarakat dengan kuat. Masyarakat semakin meragukan dan tidak percaya terhadap proses politik karena merasa di kontrol oleh kelompok elit, yang dimana dalam pengambilan keputusan masyarakat tidak dilibatkan, sehingga semangat mereka untuk berpartisipasi menurun dan Juga masyarakat jadi tidak peduli dengan berjalanya demokrasi di desa Bandar Klippa.

Selain itu, kurangnya penyampaian informasi yang jelas dan merata tentang calon kepala desa membuat warga kesulitan mendapatkan informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang bijak. Masalah ekonomi juga membatasi akses dan peluang masyarakat untuk terlibat secara aktif, sehingga kondisi partisipasi

politik semakin memburuk. Dampak dominasi oligarki terhadap partisipasi politik masyarakat sangat terasa. Masyarakat mengalami keraguan serta ketidakpercayaan terhadap proses politik yang dianggap telah dikontrol oleh kelompok elit di desa, sehingga melemahkan semangat mereka untuk berpartisipasi. Selain itu, kurangnya transparansi dalam sosialisasi juga membatasi kemampuan warga untuk memperoleh informasi cukup guna membuat keputusan yang rasional. Faktor ekonomi yang membatasi akses dan peluang masyarakat untuk terlibat secara aktif semakin memperparah kondisi partisipasi politik. Fenomena ini menyebabkan munculnya sikap materialis, kekecewaan, dan bahkan golput di kalangan masyarakat desa, sebuah indikasi bahwa mekanisme demokrasi partisipatif belum berjalan dengan baik di bawah dominasi oligarki lokal. Dengan kata lain, pengaruh oligarki tidak hanya membatasi kontestasi politik, tetapi juga menghalangi partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi di tingkat desa.

### **Dampak persepsi masyarakat terhadap demokrasi dan oligarki dalam konteks stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan di Desa Bandar Klippa**

Dampak persepsi masyarakat terhadap demokrasi dan oligarki dalam konteks stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan di Desa Bandar Klippa dari hasil wawancara, menunjukkan bahwa ketika masyarakat menilai bahwa demokrasi berjalan dengan baik, misalnya ada transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat. Kondisi ini mendorong partisipasi aktif warga, memperkuat legitimasi kepemimpinan, dan mendukung jalannya program pembangunan desa secara berkelanjutan. Stabilitas sosial pun lebih terjaga karena masyarakat merasa aspirasinya benar-benar diperhatikan. Sebaliknya, jika masyarakat menilai bahwa praktik pemerintahan desa cenderung oligarkis misalnya kekuasaan hanya berputar di kelompok tertentu, adanya dinasti politik, atau kurang transparan dalam pengelolaan dana desa, maka hal ini dapat memicu ketidakpercayaan, sikap apatis terhadap politik, bahkan potensi munculnya konflik horizontal. Situasi seperti ini justru menghambat pembangunan berkelanjutan karena melemahkan partisipasi warga sekaligus memperlemah fungsi kontrol sosial.

Dampak lain yang cukup serius adalah meningkatnya fragmentasi sosial di masyarakat. Ketika kekuasaan terlalu lama dikuasai oleh satu kelompok, maka potensi konflik horizontal antara kelompok pendukung dan kelompok oposisi bisa meningkat. Situasi ini menimbulkan polarisasi sosial dan politik yang tidak sehat dalam kehidupan desa, serta memperlemah kohesi sosial. Dengan demikian, meskipun perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas pemerintahan desa, namun tanpa pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari

masyarakat, kebijakan ini justru dapat menciptakan oligarki dan menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat.

Persepsi masyarakat terhadap praktik demokrasi dan dominasi oligarki memiliki konsekuensi langsung terhadap stabilitas sosial dan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa proses politik transparan dan akuntabel, kepercayaan publik meningkat dan partisipasi dalam program pembangunan juga bertambah. Sebaliknya, ketika masyarakat menilai politik desa dikuasai oleh elite, muncul apatisme dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Beberapa responden juga menyebutkan bahwa konflik horizontal pernah terjadi akibat perbedaan dukungan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi yang tidak sehat dapat melemahkan kohesi sosial. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap demokrasi dan oligarki di Desa Bandar Klippa memainkan peran penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Persepsi positif mendorong legitimasi dan stabilitas sosial, sedangkan persepsi negatif berpotensi memperlemah semangat partisipatif masyarakat serta memperburuk ketimpangan sosial.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkap persepsi masyarakat Desa Bandar Klippa terhadap demokrasi oligarki dalam kontestasi politik lokal, khususnya pemilihan kepala desa (Pilkades), melalui pendekatan kualitatif yang mendalam. Temuan utama menunjukkan bahwa persepsi warga terhadap praktik demokrasi bersifat kompleks dan ambivalen: di satu sisi, Pilkades dipandang sebagai wujud konkret kedaulatan rakyat, tetapi di sisi lain, sering kali terlihat sebagai ritual formalitas yang didominasi oleh elite lokal melalui jaringan patron-klien. Partisipasi politik masyarakat cenderung pasif, dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan, ketimpangan ekonomi yang membuat prioritas beralih ke kebutuhan sehari-hari, serta nilai budaya gotong royong yang justru memperkuat hierarki sosial daripada proses terbuka. Oligarki lokal, yang terkonsentrasi pada segelintir keluarga atau mantan pejabat, secara signifikan memengaruhi mekanisme kontestasi politik dengan membatasi transparansi informasi, mengurangi keterlibatan warga, dan menimbulkan sikap apatis, materialis, serta golput. Hal ini tidak hanya melemahkan pilar partisipatif demokrasi, tetapi juga menciptakan ketergantungan yang memperburuk ketidakadilan sosial.

Lebih lanjut, dampak persepsi ini terhadap stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan sangat krusial. Persepsi positif terhadap demokrasi seperti adanya transparansi dan akuntabilitas meningkatkan kepercayaan, mendorong partisipasi aktif, dan memperkuat legitimasi kepemimpinan, yang pada gilirannya mendukung program pembangunan desa yang inklusif. Sebaliknya,

persepsi negatif akibat dominasi oligarki memicu ketidakpercayaan, apatis politik, fragmentasi sosial, dan potensi konflik horizontal, yang menghambat regenerasi kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahirul Habib Padilah, I. P., Padilah, A. H., Patriani, I., Ritaudin, R., Nazari, N. A., & Apriyani, E. (2025). Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa dalam Dinamika Masa Jabatan 8 Tahun: Studi Kasus di Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi. *Of Administration, Governance, and Political Issues*, 61-70.
- Brutu, S., Nainggolan, J. A., Sembiring, G. R., Trisna, W. A., Nainggolan, G., Andini, P., & Prayetno. (2024). Analisis Hubungan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Warga Negara (Studi Kasus di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan). *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 137-146.
- Cahyono, A. D. (2021). (Library Research) Peranan Perkembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. *Jurnal Ilmiah Pamenang - JIP*, 29-30.
- Han, W. P., Erviriani, Siregar, A. R., Ivone, & Lisa. (2019). Akademi Sekretari Manajemen Cendana Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(2), 1-6.
- Hartika, D., Nurainun, Harahap, N. F., & Ivanna, J. (2024). Budaya Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 di Desa Bandar Klippa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 24549-24554.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- wibowo, G. A., Imanullah, M. A., Sainatika, H. R., & Isfany, F. R. (2024). Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 232.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarki*. Cambridge: Cambridge University Press.